



KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

ORASI KEBUDAYAAN INDONESIA DI UJUNG 2011 MENYAMBUT 2012
"MENUJU BANGSA BERPERADABAN"

Jakarta, 28 Desember 2011

"Indonesia Dalam genggaman Politisi beradab"

Yang Saya Hormati,

- Panitia Pelaksana Orasi Kebudayaan;
- Para Pembicara dan Peserta Orasi Budaya;
- hadirin yang berbahagia;

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua,

Sebuah kehormatan bagi saya dapat berkesempatan bersama-sama saudara-sudara untuk hadir dalam acara Orasi Kebudayaan di Ujung 2011 dan Menyambut 2012 dengan tema besar "Menuju Bangsa Berperadaban".

Berkaitan dengan tema tersebut, topik pembicaraan yang diberikan Panitia Seminar kepada saya adalah mengenai **Indonesia Dalam Genggaman Politisi Beradab**, yang tentu saja dalam perspektif kebudayaan Indonesia, karena permasalahan "politisi

beradab” tidak dapat dibicarakan sebagai entitas yang berdiri-sendiri, tetapi selalu berkaitan dengan interaksi sosial dan budaya Indonesia secara keseluruhan.

Persoalan keberadaban politisi, sejauh yang saya ketahui, selalu hadir dan menjadi topik diberbagai *mass media*, dan bahkan hampir semua stasiun televisi di sepanjang tahun 2011 ini. Beberapa waktu yang lalu, ada salah satu lembaga survey yang menyebutkan bahwa pamor politisi DPR jeblok di mata masyarakat. Dalam survey terungkap, responden yang menilai bahwa kinerja politisi itu baik hanya sebesar 23,4%, bahkan 51,3% di antaranya menilai bahwa kerja politisi sangat buruk.

Setidaknya, hasil survey ini merupakan pelajaran agar meningkatkan pola kaderisasi dan sistem rekrutmen calon anggota legislatif, yang lebih baik dan selektif. Sementara masyarakat sendiri, diharapkan juga harus siap memilih calon anggota legislatif yang berkualitas dan mempunyai integritas dan pada akhirnya diharapkan menjadi politisi yang beradab.

Hadirin yang saya hormati,

Pemahaman terhadap “berperadaban” selalu berkaitan dengan **persoalan etika** dan **moralitas** yang tidak lepas dari masalah kebudayaan. Mempersoalkan kebudayaan Indonesia dalam etika dan moralitas dewasa ini menjadi penting, karena bagaimanapun,

kebudayaan merupakan identitas suatu bangsa yang dapat membedakan antara suatu bangsa dengan bangsa lain. Identitas budaya merupakan suatu perangkat konsep dan nilai yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, antar sesama manusia, serta antara manusia dan alam semesta. Hubungan ini, terus mengalami perubahan tata-nilai akibat adanya interaksi antarbudaya dan bangsa, dalam menghadapi tantangan yang berat dalam pembangunan bidang kebudayaan ini.

Oleh karena itu, tema "**politisi beradab**" akan selalu berkaitan dengan perspektif kehidupan masyarakat, yang memiliki hubungan-hubungan tertentu, yang sering disebut sebagai struktur sosial (struktur masyarakat), sehingga penilaian terhadap politisi dapat saja berbeda diantara berbagai struktur sosial tersebut.

Saya tidak memungkiri, bahwa kaitan politisi beradab dengan struktur sosial sampai sekarang masih menjadi polemik: Apakah struktur itu yang membentuk politisi menjadi beradab, sebagai entitas yang terpisah, atau bahkan politisilah yang membentuk struktur sosial yang memungkinkan terbentuknya kelompok elit dalam masyarakat.

Tidak sedikit orang mengkritik bahwa tersubordinasinya persoalan politik ke dalam struktur (sosial), menyebabkan politik dipakai sebagai alat untuk menunjang struktur sosial yang telah ditetapkan oleh suatu "*grand design*" politisi tertentu. Hal ini menyebabkan politik tidak saja kehilangan otonominya, melainkan juga telah dimanipulasikan sedemikian rupa, sehingga menjadi

sekadar **alat legitimasi** bagi para politisi untuk membenarkan tingkah lakunya. Sementara idealnya, para politisi yang beradab harus dapat mengarahkan masyarakat untuk masuk ke dalam suatu keadaan dan tatanan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan, yang memungkinkan terjadinya situasi yang berkeadilan sosial.

Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan masa depan Indonesia, menurut hemat saya, **revitalisasi dan reaktualisasi nilai etika dan moral politisi** agar dapat tampil sebagai “politisi beradab,” merupakan upaya yang perlu dilakukan.

Pengembangan dan pembinaan kader politik perlu diarahkan untuk **mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa**, melalui (1) aktualisasi nilai-nilai etika dan moral, dan penguatan ketahanan budaya dalam menghadapi derasnya nilai materialisme; (2) meningkatkan kemampuan para politisi dalam mengapresiasi pesan moral yang terkandung pada setiap kekayaan dan nilai-nilai budaya bangsa; serta (3) mendorong kerja sama yang sinergis antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi bangsa Indonesia, yaitu bangsa dengan peradaban mulia dan luhur.

Tiga hal tersebut sejalan dengan cita-cita reformasi yang bertujuan untuk membangun “Indonesia Baru”, yaitu membangun sebuah masyarakat sipil yang demokratis, dengan penegakan hukum untuk supremasi keadilan, pemerintahan yang bersih, terwujudnya keteraturan sosial dan rasa aman dalam masyarakat, dan kehidupan ekonomi yang mensejahterakan rakyat Indonesia. Cita-cita mulia ini

hanya mungkin terwujud jika dilaksanakan oleh politisi beradab, yang berintegritas tinggi.

Hadirin yang saya hormati,

Integritas itu akan terjaga jika secara konsisten para politisi mengembangkan **standar pergaulan** di dalam kelompok sosialnya, yang dapat diwujudkan dalam bentuk **aturan tertulis** yang secara sistematis dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada; dan pada saat yang dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat **untuk menghakimi** segala macam tindakan, yang secara logika-rasional umum dinilai menyimpang dari kode yang disepakati bersama.

DPR-RI telah memiliki aturan tertulis, dan ini berlaku sebagai "*self control*" bagi para anggota Dewan. Kehadiran anggota DPR dengan perangkat "*built-in mechanism*" berupa Kode Etik DPR. Kode Etik ini sangat diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan disisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan kewenangan oleh DPR.

Oleh karena itu, jika para Anggota Dewan ingin tampil sebagai politisi beradab, hanya akan dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, **jika dalam diri para Anggota Dewan memiliki kesadaran kuat untuk mengindahkan etika dan moral pada saat ingin melaksanakan kewenangan konstitusionalnya.** Tanpa etika dan moral, kredibilitas lembaga yang terhormat akan

jatuh terdegradasi menjadi sebuah lembaga yang tidak lagi dipercaya rakyat.

Hadirin yang saya hormati,

Etika dan moral, sesungguhnya dapat dibedakan. **Moral** lebih mengacu pada **baik-buruknya manusia sebagai manusia**, menuntun manusia bagaimana seharusnya ia hidup atau apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dalam kehidupan sosial, masyarakat mempunyai aturan moral yang membolehkan atau melarang perbuatan tertentu.

Sementara **etika** adalah untuk membina kehidupan yang baik **berdasarkan nilai-nilai moral tertentu**. Kehidupan manusia bersifat multi-dimensi meliputi bidang sosial, ekonomi, politik, kebudayaan. Semua ini memerlukan etika, termasuk didalamnya kehidupan berbangsa dan bernegara.

Etika dan moral berbangsa, setidaknya terdiri dari tiga hal, yaitu: *pertama*, etika dan moral individual yang lebih menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Salah satu prinsip yang secara khusus relevan dalam etika individual ini adalah prinsip integrasi pribadi, yang berbicara mengenai perilaku individual tertentu dalam rangka menjaga dan mempertahankan nama baiknya sebagai pribadi yang bermoral.

Kedua, etika sosial yang mengacu pada kewajiban dan hak, sikap dan pola perilaku manusia sebagai makhluk sosial dalam interaksinya dengan sesamanya. Tentu saja sebagaimana hakikat manusia yang bersifat ganda, yaitu sebagai makhluk individual dan sosial, etika individual dan etika sosial berkaitan erat satu sama lain, bahkan dalam arti tertentu sulit untuk dilepaskan dan dipisahkan satu sama lain.

Ketiga, etika lingkungan hidup yang berkaitan dengan hubungan antara manusia baik sebagai makhluk individu maupun sebagai kelompok dengan lingkungan alam yang lebih luas dalam totalitasnya, dan hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya yang berdampak langsung atau tidak langsung pada lingkungan hidup secara keseluruhan.

Hadirin yang saya hormati,

Berkaitan dengan etika dan moral, jika dikaitkan dengan politisi beradab, dapat saya sampaikan sebagai berikut, yaitu: *pertama*, politisi beradab hanya dapat dilakukan, jika para politisi itu **memiliki pemahaman terhadap etika dan moral bangsa**, terutama ketika berhadapan dengan krisis sosial, budaya, dan moral yang terjadi, yang dapat disaksikan dalam berbagai bentuk disorientasi dan dislokasi di tengah masyarakat. Seperti, disintegrasi sosial-politik yang bersumber pada euforia kebebasan; lenyapnya kesabaran sosial dalam menghadapi realitas kehidupan yang semakin sulit sehingga mudah

melakukan berbagai tindakan kekerasan dan anarkhi; merosotnya penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum, etika, moral, dan kesantunan sosial; semakin meluasnya penyebaran narkoba serta penyakit-penyakit sosial lain; dan berlanjutnya konflik dan kekerasan yang bernuansa politis, etnis, dan agama.

Kedua, moral dan etika perlu dijadikan **panduan universal yang merawat cita-cita kehidupan bernegara** untuk mencapai tujuan asasinya, yaitu kehidupan yang berjalan di atas nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa ini merupakan konsensus, sebagai rujukan berinteraksi dalam seluruh dimensi kehidupan. Setiap sikap dan perilaku di ruang publik, harus mencerminkan nilai-nilai itu, agar cita-cita dan keutuhan masyarakat tetap terjaga.

Ketiga, konsepsi dasar moral dan etika para politisi tentang sebuah negara, perlu terus mengacu pada **konsensus nilai-nilai** yang ada, **yang hidup dan berkembang** dalam masyarakat, terutama **nilai-nilai mayoritas yang menjadi sebuah keniscayaan dalam mewarnai tata perilaku warga bangsa**. Hal ini akan terjadi, jika politik kekuasaan berjalan di atas landasan demokrasi dan menempatkan rakyat sebagai yang berdaulat, sehingga nilai-nilai yang berkembang di masyarakat tetap berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan.

Keempat, moral dan etika para politisi harus dilahirkan dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, yang tujuannya adalah **menjalin kebersamaan, merawat kesatuan**, dan mencapai **kehidupan**

yang tenteram, harmonis, dan sejahtera. Nilai merupakan landasan perilaku dalam seluruh sendi kehidupan, bukan sebagai legitimasi atau hiasan belaka. Moral dan etika dalam perilaku masyarakat, termasuk dalam politik bernegara adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, karena menafikkan salah satunya berarti menarik kegiatan politik dari dimensi sosial dan hanya menjadi urusan pribadi. Moral dan etika membingkai politik, agar berjalan konsisten sesuai tujuan asasnya, sehingga tanggung jawab dan kewajiban manusia terhadap negara, terhadap hukum yang berlaku, dan terhadap sesama manusia, dapat ditegakkan.

Atas dasar pemahaman tersebut, saya berpendapat bahwa pengembangan etika dan moral para politisi harus bersumber dari empat pilar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Persatuan Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,

Ijinkan saya untuk membahas terlebih dahulu dasar etika dan moral *pertama*, yaitu Pancasila yang saya pandang sebagai dasar moral dan etika yang penting, karena Pancasila memiliki nilai-nilai universal. Moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dapat digali dari Pancasila yang memancarkan nilai-nilai moral dan etika, yang harus ditumbuhkembangkan dan diimplementasikan oleh setiap individu warga negara Indonesia.

Sila pertama Pancasila memberikan pesan, bahwa etika dan moral merupakan inti dari setiap agama, karena berkaitan dengan masalah keyakinan. Setiap pemeluk agama harus menyadari bahwa kaidah-kaidah yang berlaku untuk setiap pribadi adalah mutlak bagi dirinya. Tetapi sebagai anggota masyarakat, keyakinan tersebut harus diperkaya dengan pengetahuan dan didialogkan dengan agama-agama lain. Dengan demikian, akan lahir tradisi beragama yang sehat, dewasa, dan inklusif di antara warga negara, sehingga dapat melahirkan nilai-nilai etika dan moral yang dapat dijadikan sebagai pegangan untuk menjalani kehidupan keagamaan yang toleran.

Sila kedua mengajarkan, bahwa sebagai perorangan maupun anggota masyarakat, wajib memperhatikan individu maupun kelompok lain sebagai manusia yang memiliki HAM yang komprehensif. Semua manusia memiliki hak sosial, politik, ekonomi, dan budaya, yang kesemuanya itu saling melengkapi, sehingga terbangun citra diri yang manusiawi. Sementara itu, sila ketiga menekankan rasa persatuan, karena rasa inilah yang membentuk sebuah bangsa besar dari Sabang sampai Merauke. Rasa inilah yang mampu mengikat kekayaan kebhinnekaan dalam kesatuan dan kebersamaan. Meskipun di berbagai bagian Indonesia, terdapat rumpun-rumpun bangsa tertentu, tetapi dasar negara Indonesia bukanlah berdasarkan nilai-nilai kerumpunan, tetapi nilai-nilai persatuan.

Sila keempat memberikan dasar-dasar utama bagi terciptanya konsensus dalam keberagaman. Konsensus menjadi sebuah rumus

yang mempersatukan, dan tidak mempersoalkan, antara minoritas dengan mayoritas, yang disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti keturunan, agama, dan lain sebagainya. Konsensus merupakan sebuah kata kunci untuk melintasi batas adat budaya tertentu yang bersifat primordial, sehingga primordialisme menjadi faktor yang dapat memecah persatuan. Karena itu musyawarah dan mufakat menjadi rumus untuk menentukan ketika terjadi hitung-hitungan mayoritas dan minoritas. Sila keempat ini, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, jelas diatur bahwa, diberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat untuk melaksanakan permusyawaratan, mendahulukan konsensus di dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya.

Sila kelima, menempatkan keadilan sebagai sebuah elemen penting untuk stabilitas dan pertahanan sebuah negara. Tanpa adanya keadilan bagi seluruh rakyatnya, maka sebuah negara menjadi tidak fungsional. Secara kalkulatif, dalam aspek pertahanan konvensional, negara bisa dihitung dengan jumlah kendaraan militer, senjata, dan perangkat-perangkat keras pertahanan lainnya, yang biasa disebut Alat Utama Sistem Persenjataan (alutsista). Namun, sesungguhnya perangkat-perangkat keras tersebut tidak akan efektif dan kuat kalau tidak ditopang dengan transformasi nilai-nilai keadilan.

Kelima nilai yang sangat penting tersebut, yang terangkum dalam sila-sila dalam Pancasila, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini memang terasa ada upaya untuk

memarjinalkannya. Namun, saya tetap percaya, tidak ada yang salah dengan Pancasila, yang keliru adalah membuat pemaknaan tunggal atas Pancasila yang kemudian dipaksakan sebagai alat politik untuk mempertahankan *status quo* kekuasaan.

Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,

Pilar lain yang saya nilai relevan dalam mengembangkan etika dan moral bangsa bagi para politisi adalah persatuan Indonesia dalam bingkai bhinneka tunggal ika. Kedewasaan para politisi untuk melihat mozaik bangsa Indonesia akan bermuara pada tumbuhnya kesadaran, bahwa persatuan perlu dibangun di atas kemajemukan suku bangsa dan budaya, yang ada dalam masyarakat Indonesia. Persatuan ini juga tertuang dengan jelas dalam Sila Ketiga Pancasila sebagaimana yang saya uraikan terdahulu. Kesadaran dan semangat persatuan dalam bingkai kebangsaan bersama inilah yang kemudian menjadi landasan politik bernegara, dan menjadi acuan bersama, baik pada masa sebelum kemerdekaan, ataupun pada awal kemerdekaan.

Keberhasilan para *founding fathers* merawat rasa kebangsaan itulah, yang mengantarkan Republik Indonesia mampu meretas diri dari belenggu hegemoni kolonialisme. Oleh karena itu, untuk mempertahankan eksistensi negeri ini, maka kebersamaan di tengah keragaman dan kolektivitas di tengah heterogenitas, menjadi kata kunci utama. Sebagai sebuah bangsa yang plural dan heterogen,

semua upaya harus dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan tanpa mengorbankan kerberagaman.

Etika dan moral bangsa bukan sekedar konsepsi, tetapi harus terimplementasi dalam sikap dan perilaku politik yang berorientasi pada kepentingan seluruh masyarakat tanpa terkecuali, bukan kepentingan primordial suku bangsa tertentu atau etnik dan budaya tertentu. Perlu kesadaran historis dan moral agar nilai-nilai yang tercantum dalam persatuan Indonesia menjadi penghayatan individual demi pertanggungjawaban kepada sejarah, dan kepada seluruh masyarakat, dan kepada Tuhan yang Maha Esa. Etika dan moral dalam kerangka persatuan dan bhinneka tunggal ika inilah yang akan menjadi dasar pertimbangan yang bijaksana yang dapat mengatasi berbagai perbedaaan yang senantiasa muncul dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam kaitan ini, mengulangi apa yang telah saya sampaikan sebelumnya, maka konsensus menjadi hal yang sangat penting dan fundamental dalam menata dan membangun masyarakat yang plural, sekaligus penting bagi kontinuitas pembangunan dan masa depan sebuah negara. Masyarakat yang plural memerlukan transformasi dan aplikasi nilai-nilai moral dan etika secara tepat.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Saya mengkhiri uraian ini dengan kesimpulan, bahwa politisi beradab adalah politisi yang **memiliki etika** dan **moral yang dituntut untuk berperilaku yang mementingkan kebaikan**

bersama, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, yang terwujud apabila dilandasi oleh kejernihan hati nurani, moralitas, kerendahan hati, keikhlasan, kejujuran, dan tanggung jawab. Para politisi harus menyerahkan loyalitasnya kepada negara termasuk kepada pemimpin negara yang amanah, baik di pusat maupun di daerah. Loyalitas kepada negara harus lebih besar daripada loyalitas kepada partai atau kelompok ketika seseorang sudah menjadi pejabat negara. Inilah sosok politisi sejati yang digerakkan oleh wawasan kebangsaan yang terserap dalam dirinya. Untuk menciptakan politisi yang beradab diperlukan sebuah **sistem dan mekanisme yang menunjang atau bahkan memaksa** untuk itu. Sistem itulah yang mampu menunjukkan kepada publik mengenai kualitas moral dan etika yang dimiliki oleh aktor-aktor atau elite-elite politik yang kewenangan politiknya bersumber dari kedaulatan rakyat. Sekian, terima kasih.

**Wallahul Muwafiq Illa Aqwamiththariq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Jakarta, 28 Desember 2011

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Dr. H. MARZUKI ALIE